



LAPORAN PENELITIAN KEBIJAKAN BAN

RANGKUMAN

Pembangunan Berperspektif Gender

Melalui Kesetaraan Gender
dalam Hak, Sumber Daya
dan Kebebasan Berpendapat

BANK DUNIA 2000

Rangkuman

DISKRIMINASI BERDASARKAN GENDER MASIH TERJADI pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang.

Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan-suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (*semua orang*)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Banyak fakta di seluruh dunia yang dapat ditampilkan untuk mendukung pernyataan ini. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi saja belumlah memadai. Di sini dibutuhkan juga institusi yang memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, serta dibutuhkan juga langkah-langkah kebijakan untuk menangani ketidaksetaraan yang masih mengakar. Laporan ini mengusulkan tiga strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender:

- *Reformasi institusi guna menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki.* Reformasi institusi hukum dan ekonomi penting dilakukan untuk meletakkan dasar persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Mengingat hukum atau peraturan-peraturan yang ada di banyak negara masih terus melanggengkan ketidaksetaraan gender, maka reformasi hukum mutlak diperlukan terutama hukum rumahtangga, perlindungan terhadap kekerasan, hak atas tanah, pekerjaan, dan politik.
- *Mendorong pertumbuhan ekonomi guna memperbesar kesetaraan sumber daya dan partisipasi.* Peningkatan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan cenderung mengurangi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, kesehatan, dan gizi. Daya produksi atau produktivitas yang meningkat dan lapangan kerja baru seringkali mengurangi ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan. Investasi pada infrastruktur seperti air bersih, energi, dan transportasi dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan beban kerja.
- *Mengambil langkah aktif untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam penguasaan sumber daya dan aspirasi dalam politik praktis.* Karena reformasi institusional dan pembangunan ekonomi sering tidak memadai, maka dibutuhkan langkah aktif untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam jangka pendek dan jangka menengah.

Kesetaraan Gender-dalam Hak, Sumber Daya dan Aspirasi

KATA ‘GENDER’ DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI PERAN YANG dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki-namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki.

Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan

partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi.

Istilah '*kesetaraan gender*' bisa diartikan secara berbeda-beda apabila dikaitkan dengan konteks pembangunan. Laporan ini mengartikan kesetaraan gender sebagai kesetaraan di bidang hukum, kesempatan (termasuk kesetaraan upah kerja, kesetaraan akses terhadap sumber daya manusia, dan sumber-sumber produktif lainnya yang memperluas kesempatan) dan aspirasi (untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pembangunan). Kami tidak mengartikan kesetaraan gender sebagai kesetaraan atas apa yang dihasilkan. Hal ini didasarkan pada dua alasan sebagai berikut, pertama, tiap-tiap budaya dan masyarakat dapat mengambil jalan yang berbeda dalam upaya mereka mencapai kesetaraan gender. Kedua, kesetaraan secara implisit berarti kebebasan bagi perempuan dan laki-laki untuk memilih peran dan akibat-akibat yang berbeda (atau serupa) yang disesuaikan menurut pilihan-pilihan dan tujuan-tujuan mereka sendiri.

Laporan ini menggunakan berbagai tipe data dan pola analisa untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender di dunia ketiga. Namun, upaya mengukur beragamnya dimensi kesetaraan gender sangatlah rumit. Hambatan utamanya adalah kurangnya analisis dan data yang dibedakan berdasarkan gender yang berkaitan dengan beberapa aspek penting dari kesetaraan gender. Mengingat bukti-bukti empiris lebih banyak tersedia di negara-negara maju daripada di negara-negara berkembang, laporan ini juga membahas pengalaman negara-negara industri. Laporan ini mengkombinasikan analisis mikro, nasional dan internasional, dan membahas penelitian empiris dari sejumlah disiplin ilmu sosial.

Meski ada Kemajuan, Ketidaksetaraan Gender Tetap Terjadi di Semua Negara

PADA SEPARUH AKHIR ABAD KE-20 KITA MENYAKSIKAN adanya peningkatan dalam status perempuan dan kesetaraan gender di sebagian besar negara berkembang.

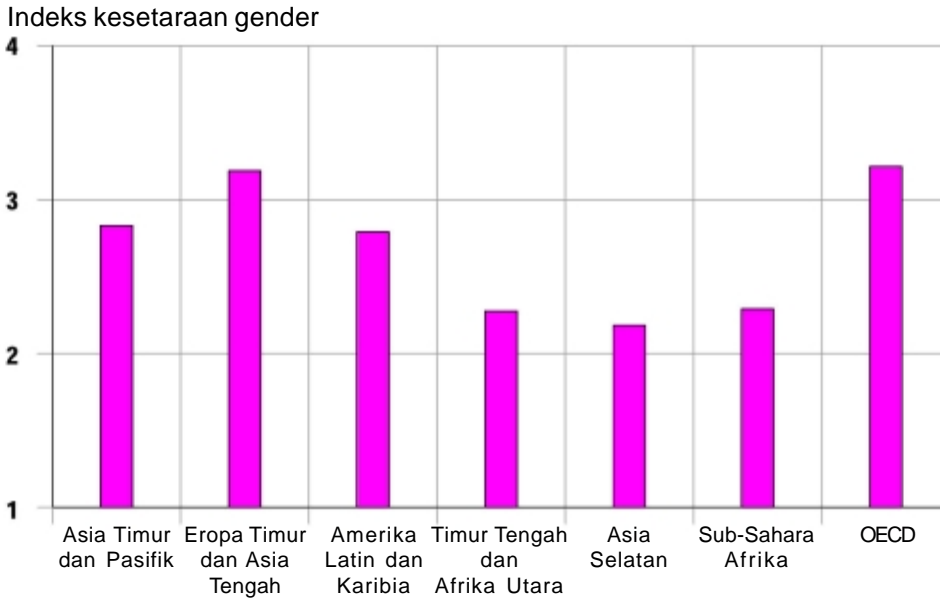
- Dengan beberapa pengecualian, secara umum tingkat pendidikan perempuan meningkat secara pesat. Rata-rata jumlah anak perempuan yang mendaftar ke sekolah dasar di Asia Tenggara, Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah dan Afrika Utara meningkat kurang lebih dua kali lipat. Hal ini, secara signifikan, mengurangi kesenjangan gender dalam dunia pendidikan.
- Harapan hidup perempuan meningkat 15 sampai 20 tahun di negara berkembang. Melalui peningkatan anggaran yang lebih besar bagi anak-anak perempuan maupun perempuan dewasa, serta akses yang lebih baik dalam perawatan kesehatan, maka pola harapan hidup bagi perempuan dan laki-laki telah meningkat di semua kawasan negara berkembang. Untuk pertama kalinya, dalam periode 1990-an, perempuan di Asia Selatan rata-rata hidup lebih lama daripada laki-laki.
- Lebih banyak perempuan masuk dalam angkatan kerja. Sejak 1970, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah meningkat rata-rata 15 persen di Asia Timur dan Amerika Latin. Pertumbuhan angkatan kerja ini lebih besar daripada yang terjadi pada laki-laki, sehingga memperkecil kesenjangan gender dalam pekerjaan. Kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki juga semakin kecil.

Meskipun ada kemajuan, ketidaksetaraan gender dalam hak, sumber daya dan aspirasi masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang, bahkan di sebagian negara berkembang tidak terjadi kemajuan yang berarti. Selain itu, krisis sosio-ekonomi di beberapa negara telah berakibat buruk terhadap berbagai kemajuan yang dengan susah payah telah dicapai.

Persamaan Hak

Tidak satu pun negara (seperti tampak pada gambar 1) telah menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hak-hak sosial, ekonomi dan hukum. Di sejumlah negara, perempuan dibatasi haknya atas kepemilikan tanah, mengelola properti, berbisnis, bahkan melakukan perjalanan tanpa persetujuan suami. Di banyak kawasan Sub-Sahara Afrika, sebagian besar perempuan memperoleh hak atas tanah melalui suami mereka atas dasar perkawinan, dan seringkali hak-hak ini hilang saat terjadi perceraian atau kematian sang suami. Ketidaksetaraan gender dalam hak membatasi pilihan yang tersedia bagi perempuan di berbagai aspek kehidupan, sehingga seringkali sangat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi atau memperoleh manfaat dari pembangunan.

Gambar 1. Ketidaksetaraan Gender dalam Hak-Hak Dasar Terjadi di Seluruh Dunia



Catatan: Nilai 1 menunjukkan kesetaraan hak gender yang rendah, nilai 4 kesetaraan yang tinggi (lihat catatan 1 pada akhir rangkuman untuk informasi lebih lanjut).

Sumber: Data mengenai hak-hak dari Humana (1992); data penduduk dari Bank Dunia (1999)

Sumber Daya

Perempuan masih memiliki keterbatasan akses atas beragam sumber daya produktif, termasuk pendidikan, tanah, informasi, dan keuangan. Di Asia Selatan, rata-rata jumlah jam yang digunakan perempuan bersekolah hanya separuh dari yang digunakan laki-laki, dan jumlah anak perempuan yang mendaftar ke sekolah menengah hanya dua pertiga dari jumlah anak laki-laki. Banyak perempuan tidak memiliki tanah, dan meski mereka memilikinya, status kepemilikannya lebih lemah daripada laki-laki. Di banyak negara berkembang, wirausaha yang dikelola oleh perempuan cenderung kekurangan modal, kurang memiliki akses terhadap mesin, pupuk, informasi tambahan, dan kredit dibandingkan wirausaha yang dikelola laki-laki. Ketidaksetaraan semacam ini, baik dalam pendidikan maupun sumber daya produktif lainnya, berdampak buruk terhadap kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kontribusi mereka dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangga. Ketidaksetaraan tersebut juga memperbesar risiko dan menurunkan daya tahan apabila terjadi persoalan pribadi atau rumah tangga. Ketidaksetaraan juga menurunkan daya tahan

saat usia mulai lanjut dan terjadinya guncangan ekonomi.

Meski tercatat adanya kemajuan yang dicapai perempuan dalam pendidikan dewasa ini, tapi mereka masih tetap mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal itu tetap terjadi meski perempuan dan laki-laki memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang sama. Di negara-negara berkembang, perempuan seringkali dibatasi jenis pekerjaannya dan biasanya tidak ditempatkan pada posisi-posisi manajemen di sektor formal. Di negara-negara industri, perempuan di sektor kerja upahan berpenghasilan rata-rata 77 persen dari penghasilan laki-laki di sektor yang sama; sementara itu di negara-negara berkembang rata-rata berkisar 73 persen. Hanya sekitar seperlima dari kesenjangan upah itu bisa dijelaskan berdasarkan perbedaan gender dalam pendidikan, pengalaman kerja atau sifat-sifat pekerjaan.

Aspirasi

Terbatasnya akses terhadap sumber daya dan lemahnya kemampuan untuk menghasilkan pendapatan-baik di bidang wirausaha maupun swasta-menghambat partisipasi perempuan dalam distribusi sumber daya dan berbagai keputusan investasi di rumah. Ketidaksetaraan hak dan status sosio-ekonomi perempuan yang lebih lemah dibandingkan laki-laki juga membatasi kemampuannya mempengaruhi pengambilan keputusan di komunitas mereka maupun di tingkat nasional. Perempuan tetap kurang terwakili baik dalam dewan perwakilan lokal maupun nasional. Jumlah wakil perempuan di dewan perwakilan atau parlemen rata-rata kurang dari 10 persen atas jumlah kursi dewan yang ada (kecuali di Asia Selatan di mana rata-ratanya 18-19 persen). Tidak ada satu pun negara berkembang di mana perempuan menempati lebih dari 8 persen dalam posisi-posisi kementerian. Bahkan, sejak tahun 1970-an di banyak negara tidak terjadi kemajuan yang berarti. Di Eropa Timur, jumlah wakil perempuan di parlemen menurun dari 25 menjadi 7 persen sejak awal transisi politik dan ekonomi.

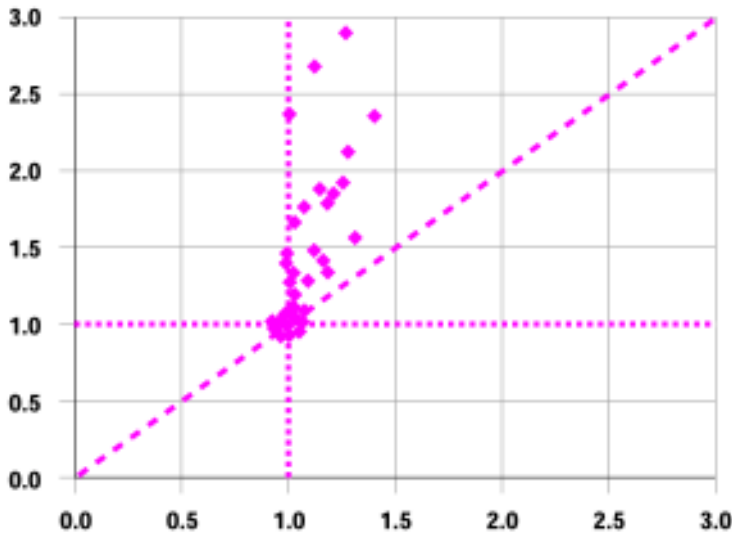
Ketimpangan Gender Cenderung Paling Banyak Terjadi di antara Kaum Miskin

KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN DAN kesehatan paling banyak terjadi di kalangan kaum miskin. Baru-baru ini, sebuah penelitian terhadap pendaftaran siswa ke

sekolah di 41 negara memperlihatkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah di negara-negara tersebut umumnya lebih tinggi di antara kaum miskin (gambar 2). Pola serupa ditemukan pada rumahtangga-rumahtangga miskin dan non-miskin berdasarkan angka kematian anak laki-laki dan perempuan di bawah usia lima tahun.

Gambar 2. Ketimpangan Gender Cenderung Lebih Besar di Kaum Miskin daripada Kaum Kaya

Rasio pendaftaran siswa laki-laki dan perempuan ke sekolah di kalangan kaum miskin



Rasio pendaftaran siswa laki-laki dan perempuan di kalangan kaum kaya

Catatan: Rasio jumlah pendaftaran siswa ke sekolah berkaitan dengan proporsi anak-anak usia 6-14 yang didaftarkan di sekolah, bukan soal tingkatannya. Keluarga miskin diartikan sebagai keluarga yang berada pada lapisan bawah 40 persen distribusi “kekayaan”, sedangkan keluarga kaya adalah mereka yang berada pada lapisan atas 20 persen. Garis diagonal menunjukkan kesenjangan gender yang sama antara kalangan miskin dan kaya.

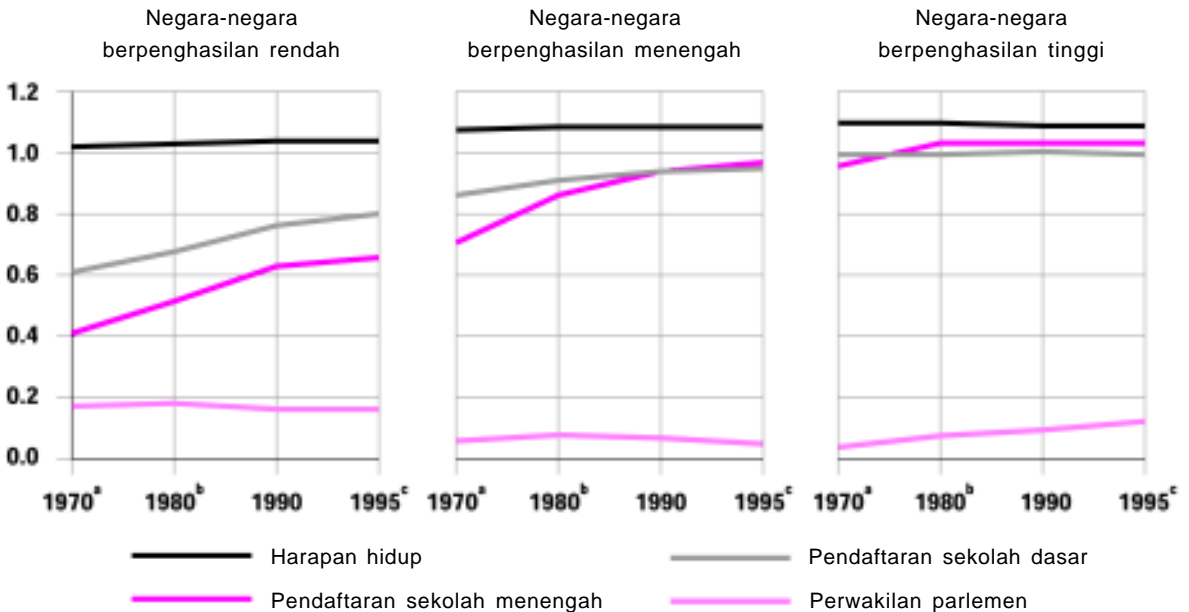
Sumber: Filmer 1999.

Pola serupa juga muncul sewaktu membandingkan negara-negara kaya dan miskin. Sementara kesetaraan gender dalam pendidikan dan kesehatan jelas membaik selama 30 tahun terakhir di negara-negara berpenghasilan rendah, namun ketidaksetaraan antara jumlah anak perempuan dan laki-laki yang mendaftar ke sekolah masih tinggi di negara-negara tersebut dibanding di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi (gambar 3). Meskipun terdapat kaitan antara pembangunan ekonomi dan kesetaraan gender, jumlah wakil perempuan di parlemen masih tetap rendah. Beberapa negara berpenghasilan rendah, seperti Cina dan Uganda, telah

mengupayakan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk duduk di parlemen, sehingga mencapai jumlah wakil perempuan yang bahkan lebih tinggi daripada negara-negara berpenghasilan tinggi. Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana kuatnya pengaruh tekanan-tekanan sosial terhadap persoalan kesetaraan gender.

Gambar 3. Kesetaraan Gender Meningkat dari Waktu ke Waktu di Negara Berpenghasilan Rendah dan Menengah-Kecuali dalam Partisipasi Politik

Rasio perempuan terhadap laki-laki



Catatan: Rata-rata sementara jumlah pendaftaran ke sekolah adalah total pendaftaran pada tingkat sekolah, tanpa memandang usia, yang dinyatakan sebagai persentase populasi usia-sekolah yang resmi. Rasio pendaftaran ke sekolah antara perempuan dan laki-laki adalah jumlah sementara pendaftaran perempuan dibagi dengan jumlah sementara pendaftaran laki-laki. Untuk perwakilan parlemen, rasionya adalah jumlah kursi yang diduduki perempuan terhadap kursi yang diduduki laki-laki. Semua nilai merupakan rata-rata menurut penduduk.

- a. Data parlemen dari tahun 1975.
- b. Data parlemen dari tahun 1985.
- c. Data harapan hidup dari tahun 1997.

Sumber: Data parlemen dari WISTAT (1998); data pendapatan dari Bank Dunia (1999).

Penting untuk dicatat bahwa indikator ini hanya merupakan sebagian parameter untuk mengukur kesetaraan gender. Dibutuhkan lebih banyak keterangan sistematis untuk memetakan dimensi yang lain-mulai dari

penguasaan terhadap aset keuangan dan fisik sampai persoalan otonomi. Hal itu perlu dilakukan agar dapat lebih memahami seberapa besar kesetaraan yang telah dicapai dan seberapa jauh perjalanan yang masih harus ditempuh.

Ketidaksetaraan Gender Menurunkan Kesejahteraan dan Menghambat Pembangunan

KETIDAKSETARAAN GENDER MERUGIKAN BAGI KESEHATAN dan kesejahteraan laki-laki, perempuan, serta anak-anak, dan memiliki dampak terhadap kemampuan mereka meningkatkan taraf kehidupan. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga mengurangi produktifitas peternakan dan wirausaha, sehingga mengurangi prospek mengentaskan kemiskinan dan jaminan kemajuan ekonomi. Terakhir, ketidaksetaraan gender dapat melemahkan pemerintahan suatu negara dan dengan demikian berakibat pada buruknya efektifitas kebijakan pembangunannya.

Kesejahteraan

Hal yang paling merugikan dari ketidaksetaraan gender adalah menurunnya kualitas kehidupan. Sulit untuk mengidentifikasi dan mengukur seluruh kerugian ini-namun banyak bukti dari banyak negara di dunia yang menunjukkan bahwa masyarakat dengan ketidaksetaraan gender mengalami banyak persoalan kemiskinan, kekurangan gizi, berbagai penyakit, dan banyak kerugian lainnya.

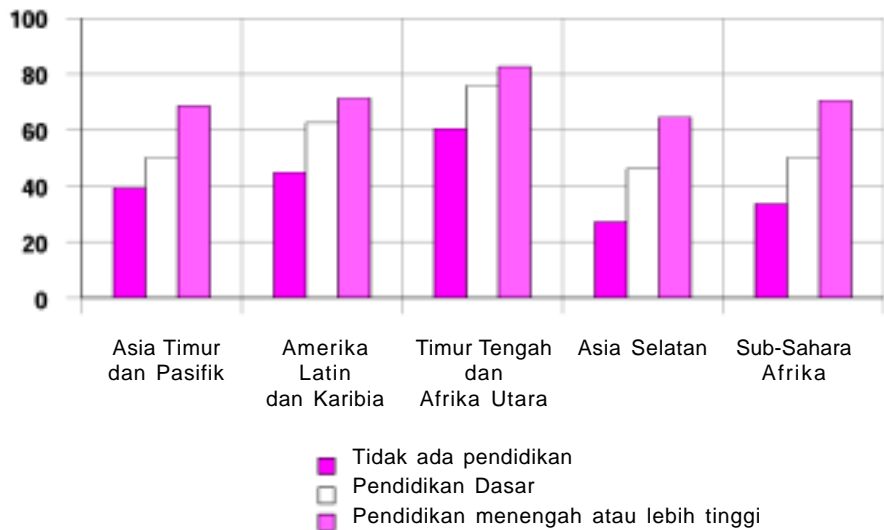
- Cina, Korea dan Asia Selatan memiliki angka kematian perempuan di atas normal. Mengapa demikian? Norma-norma sosial yang mengistimewakan anak laki-laki, ditambah kebijakan satu-anak di Cina, telah mendorong angka kematian anak perempuan menjadi lebih besar daripada laki-laki. Beberapa prediksi mengindikasikan bahwa jumlah perempuan yang hidup saat ini seharusnya 60-100 juta lebih banyak bila tidak ada diskriminasi gender.
- Tingkat buta huruf dan keterbatasan jenjang pendidikan ibu secara langsung merugikan anak-anak. Jenjang pendidikan yang rendah berakibat pada kualitas perawatan anak yang buruk dan juga angka kematian bayi dan kurang gizi yang lebih tinggi. Semakin tinggi

tingkat pendidikan seorang ibu, semakin besar kemungkinannya menyesuaikan diri dengan standar kesehatan, misalnya memberikan imunisasi kepada anaknya (gambar 4). Kesimpulan ini didukung oleh analisis yang seksama terhadap penelitian rumahtangga yang menjelaskan faktor-faktor lain yang mungkin dapat memperbaiki tindakan pengasuhan dan kesehatan rumahtangga.

Gambar 4. Rata-Rata Angka Imunisasi Anak Meningkat Seiring Tingkat Pendidikan Ibu

Persentase anak berumur 12-23 bulan yang telah diimunisasi, berdasarkan tingkat pendidikan ibu

Persen



Catatan: Semua nilai-nilai regional merupakan rata-rata berdasarkan populasi.

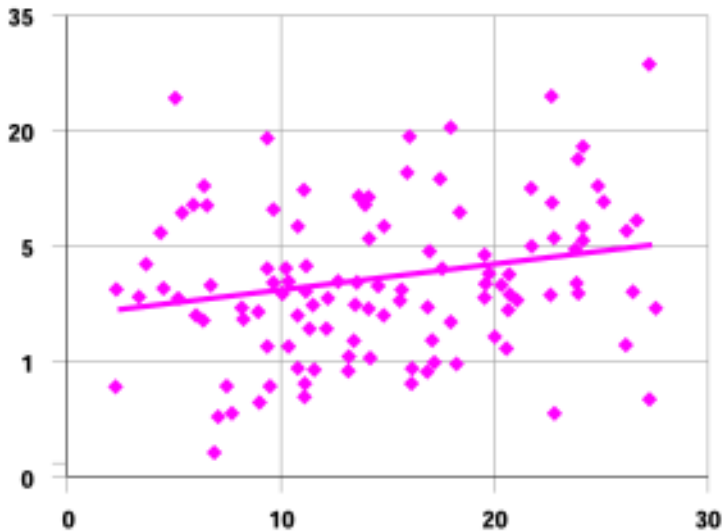
Sumber: Data imunisasi berasal dari Survei Demografi dan Kesehatan yang terbaru; sementara data kependudukan berasal dari Bank Dunia (1999).

- Sebagaimana halnya jenjang pendidikan ibu, pendapatan rumahtangga yang lebih tinggi juga erat terkait dengan angka kelangsungan hidup anak dan gizi yang lebih baik. Penghasilan tambahan oleh perempuan dalam rumah tangga cenderung berpengaruh lebih besar dibandingkan penghasilan tambahan oleh laki-laki, seperti yang diperlihatkan hasil penelitian di Bangladesh, Brazil, dan Pantai Gading. Sayangnya, norma-norma sosial yang kaku tentang pembagian kerja berdasarkan gender dan kecilnya upah kerja bagi perempuan membatasi kemampuan perempuan menghasilkan pendapatan.

- Ketidaksetaraan gender dalam jenjang pendidikan dan pekerjaan di perkotaan mempercepat penyebaran HIV (gambar 5). Epidemio AIDS akan menyebar cepat dalam waktu mendatang, sehingga satu dari empat perempuan dan satu dari lima laki-laki akan terinfeksi HIV. Kasus ini sendiri sudah terjadi di beberapa negara di Sub-Sahara Afrika.
- Sementara perempuan dan anak perempuan, khususnya yang miskin, mengalami diskriminasi berdasarkan gender, ketidaksetaraan gender juga membebani laki-laki. Selama transisi ekonomi di Eropa Timur, laki-laki telah mengalami penurunan tingkat harapan hidup dalam tahun-tahun belakangan ini. Kenaikan rata-rata jumlah kematian laki-laki-paling banyak terjadi di masa damai-berhubungan dengan peningkatan stres dan kegelisahan yang disebabkan banyaknya pengangguran di antara kaum laki-laki.

Gambar 5. Tingkat Infeksi HIV Lebih Tinggi Seiring Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam Kemampuan Baca Tulis

Tingkat prevalensi HIV orang dewasa di perkotaan (skala log)



Kesenjangan tingkat kemajuan baca-tulis antara laki-laki dan perempuan

Catatan: Plot yang ada mencakup 72 negara (32 di Sub-Sahara Afrika, 20 di Amerika Latin dan Karibia, 15 di Asia, 4 di Timur Tengah, dan 1 negara industri). Poros vertikal yang mengukur persentase penduduk perkotaan yang terinfeksi HIV telah diubah menjadi skala logaritma. Titik-titik pada tiap bidang mewakili data untuk tiap negara setelah dikesampingkannya efek variabel-variabel sosial lain yang tercakup dalam analisis regresi (termasuk GNP per kapita, suatu indeks ketidaksetaraan penghasilan, agama dan proporsi penduduk yang lahir sebagai warga asing).

Sumber: Setelah 1998.

Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Beban pada kehidupan manusia adalah beban pembangunan-karena meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan akhir pembangunan. Ketidaksetaraan gender memberikan beban pula pada produktivitas, efisiensi, dan kemajuan ekonomi. Dengan menahan akumulasi sumber daya manusia di rumah dan di pasar tenaga kerja, serta dengan sistematis mengecualikan perempuan atau laki-laki dari akses ke sumber daya, jasa publik, atau aktifitas produktif, maka diskriminasi gender mengurangi kapasitas suatu perekonomian untuk tumbuh serta mengurangi kapasitas untuk meningkatkan standar kehidupan.

- Hilangnya pendapatan disebabkan oleh ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya produktif antara laki-laki dan perempuan di dalam rumahtangga. Dalam rumahtangga di Burkina Faso, Kamerun, dan Kenya, pengendalian yang lebih setara atas sumbangan tenaga dan pendapatan di suatu peternakan antara perempuan dan laki-laki dapat meningkatkan hasil peternakan sampai sebanyak seperlima dari penghasilan sekarang.
- Investasi yang rendah untuk pendidikan perempuan juga menurunkan tingkat pendapatan suatu negara. Sebuah penelitian memperkirakan jika negara-negara di Asia Selatan, Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah, dan Afrika Utara telah mulai mengatasi kesenjangan gender dalam bidang pendidikan seperti yang telah dilakukan di Asia Timur tahun 1960 dan menurunkan kesenjangan sampai ke tingkat yang telah dicapai Asia Timur dari tahun 1960 hingga 1992, maka pendapatan per kapita mereka seharusnya dapat tumbuh lebih cepat 0,5 sampai dengan 0,9 persen setiap tahun-peningkatan yang substansial terhadap rata-rata pertumbuhan aktual (gambar 6). Penelitian lainnya memperkirakan bahwa di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi dengan rata-rata tingkat pendidikan dasar yang lebih tinggi, kenaikan 1 persen dalam keikutsertaan perempuan dalam pendidikan menengah erat kaitannya dengan kenaikan pendapatan per kapita sebesar 0,3 persen. Kedua penelitian tersebut melakukan kontrol bagi variabel-variabel lainnya yang umumnya bisa ditemukan dalam kepustakaan yang membahas soal pertumbuhan.

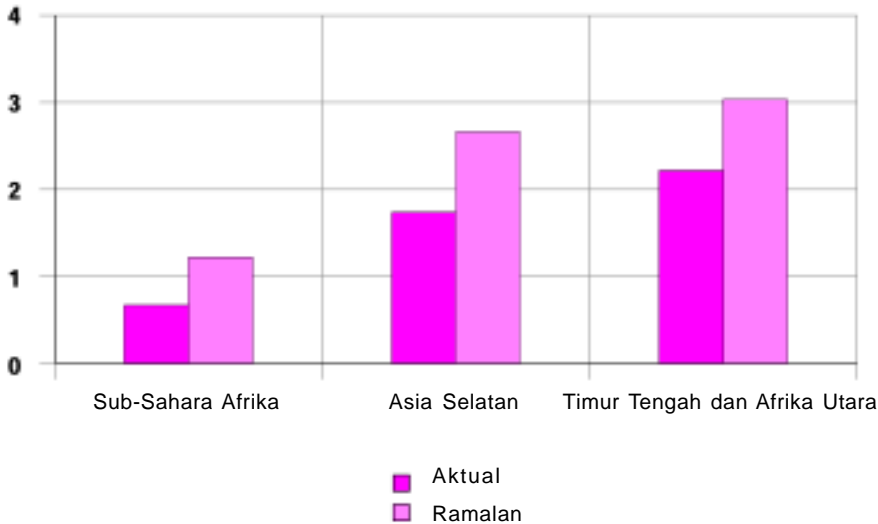
Pemerintahan

Hak-hak yang lebih besar untuk perempuan dan partisipasi yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan publik ada kaitannya

Gambar 6. Kemajuan yang Lebih Pesat dalam Mempersempit Kesenjangan Gender di Bidang Pendidikan akan Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan dalam GNP per kapita, 1960-92

Persen



Catatan: “Ramalan” artinya rata-rata tingkat pertumbuhan GNP yang diramalkan untuk suatu daerah jika kesenjangan gendernya dalam pendidikan dimulai pada tingkat Asia Timur di tahun 1960 dan telah menyusut secepat penyusutan di Asia Timur dari tahun 1960 sampai 1992.

Sumber: Simulasi berdasarkan hasil regresi dari Klasen (1999)

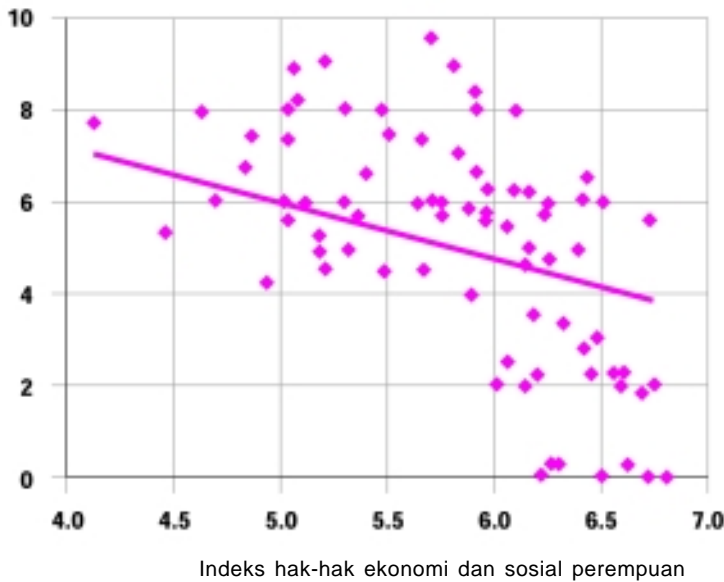
dengan penyelenggaraan bisnis dan pemerintahan yang lebih bersih dan baik. Tempat-tempat di mana pengaruh perempuan dalam kehidupan publik lebih besar, ternyata tingkat korupsinya lebih rendah. Hal ini berlaku bahkan apabila kita membandingkan negara-negara dengan tingkat pendapatan (gambar 7), kebebasan sipil, pendidikan, dan institusi hukum yang sama. Kendatipun masih berupa saran, berbagai penemuan ini memberi dukungan agar lebih banyak perempuan berkiprah dalam angkatan kerja dan politik—karena perempuan dapat menjadi pihak-pihak yang efektif bagi supremasi hukum (*rule of law*) dan pemerintahan yang bersih.

Perempuan yang berbisnis lebih kecil kemungkinannya membayar suap kepada pejabat pemerintah. Hal itu mungkin karena perempuan memiliki standar tingkah laku etika atau lebih banyak menghindari risiko yang lebih tinggi. Sebuah penelitian terhadap 350 perusahaan di republik Georgia menyimpulkan bahwa perusahaan yang dimiliki dan dikelola laki-laki 10 persen lebih besar kemungkinannya terlibat dalam praktek suap

terhadap pejabat pemerintah daripada yang dimiliki atau dikelola perempuan. Hasil penelitian ini tetap berlaku tanpa terpengaruh oleh karakteristik perusahaan, seperti misalnya pada sektor apa perusahaan beroperasi dan besar-kecilnya perusahaan, maupun oleh karakteristik pemilik atau manajer, misalnya tingkat pendidikan. Tanpa mengendalikan faktor-faktor ini, perusahaan yang dikelola laki-laki dua kali lebih besar kemungkinannya melakukan penyuapan.

Gambar 7. Hak-Hak Lebih Setara, Korupsi Berkurang

Indeks korupsi



Catatan: Indeks korupsi menggunakan data dari Pedoman Risiko Negara Internasional (ICRG) dan mengubahnya: indeks korupsi = $10 - (\text{Index ICRG} - 1) \times 2$. Variabel hak-hak perempuan adalah Indikator HAM Ekonomi dan Sosial Perempuan (WESHR) yang dikembangkan oleh Program Studi Global Universitas Purdue. Gambar ini didukung oleh data GDP per kapita di tiap negara.

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia; lihat juga Kaufmann (1998).

Mengapa Ketidaksetaraan Gender Masih Tetap Terjadi?

JIKA KETIDAKSETARAAN GENDER MENURUNKAN KESEJAHTeraan dan prospek suatu negara untuk melakukan pembangunan, mengapa ketidaksetaraan yang berbahaya ini masih tetap bertahan di

begitu banyak negara? Mengapa jenis-jenis ketidaksetaraan gender tertentu jauh lebih sulit dihilangkan daripada yang lain? Misalnya, perbaikan telah banyak terjadi dalam sejumlah dimensi seperti kesehatan dan akses terhadap jenjang pendidikan, tapi perbaikan dalam partisipasi politik dan persamaan hak milik berjalan jauh lebih lambat. Faktor-faktor apa saja yang menghalangi transformasi hubungan gender dan penghapusan ketidaksetaraan gender? Institusi, rumahtangga, dan ekonomi.

Institusi masyarakat-seperti norma sosial, adat istiadat, hak dan hukum-sebagaimana halnya institusi ekonomi, seperti pasar, membentuk peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Institusi-institusi tersebut mempengaruhi jenis sumber daya yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki, jenis aktifitas yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan, dan dalam bentuk apa mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi dan masyarakat. Institusi tersebut mewujudkan insentif yang dapat mendorong ataupun mengerem prasangka. Bahkan ketika institusi formal dan informal tidak secara eksplisit membedakan laki-laki dan perempuan, mereka umumnya dibentuk (baik secara eksplisit maupun implisit) oleh norma sosial yang berkaitan dengan peran yang sepantasnya bagi masing-masing gender. Institusi masyarakat seperti ini memiliki enersinya sendiri serta biasanya konservatif dan sulit untuk diubah, namun demikian sifatnya sama sekali tidak statis.

Seperi halnya institusi, rumahtangga memainkan peran cukup sentral dalam membentuk hubungan gender sejak dini dan dalam mewariskannya dari satu generasi ke generasi lain. Seseorang membuat banyak keputusan yang paling mendasar dalam hidupnya di dalam lingkup rumahtangga-seperti keputusan untuk mempunyai dan merawat anak, menentukan tempat bekerja dan berekreasi, dan melakukan investasi untuk masa depan. Bagaimana tugas dan sumber daya produktif dialokasikan di antara anak laki-laki dan perempuan, seberapa banyak kebebasan yang diberikan kepada mereka, apakah ada perbedaan harapan atau ekspektasi di antara mereka-semua ini menciptakan, memperkuat, atau mengurangi ketidaksetaraan gender. Tetapi rumah tangga tidak mengambil keputusan sendirian. Mereka membuat keputusan dalam konteks komunitas dan melalui cara-cara yang mencerminkan pengaruh insentif yang ditegakkan oleh institusi dan lingkungan yang lebih luas.

Oleh karena ekonomi menentukan kesempatan-kesempatan yang dimiliki seseorang untuk meningkatkan standar kehidupannya, kebijakan ekonomi dan pembangunan berdampak sangat besar terhadap ketidaksetaraan gender. Pendapatan yang lebih tinggi berarti berkurangnya tekanan-tekanan sumber daya dalam rumahtangga yang memaksa orang tua untuk

memilih antara mengalokasikan investasi untuk anak laki-laki atau perempuan. Namun bagaimana perempuan dan laki-laki terkena dampak pembangunan ekonomi tepatnya tergantung pada aktifitas apa saja yang tersedia yang menghasilkan pendapatan, bagaimana aktifitas-aktifitas tersebut dikelola, bagaimana ketrampilan dan usaha dihargai, serta apakah perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi secara setara.

Tentu saja, bahkan kebijakan pembangunan yang jelas-jelas netral gender sekalipun dapat menghasilkan sesuatu yang terbedakan secara gender-sebagian diakibatkan oleh cara-cara dimana keputusan-keputusan institusi dan rumahtangga saling terjalin untuk membentuk peran dan hubungan gender. Pembagian kerja berdasarkan gender di rumah, norma-norma dan prasangka-prasangka sosial, serta kapasitas akses atas sumber daya yang tidak setara menghalangi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh keuntungan yang setara dalam kesempatan ekonomi atau menghadapi goncangan ekonomi secara setara. Kegagalan dalam mengenali hambatan-hambatan yang *gender differentiated* ini sewaktu merancang kebijakan dapat melemahkan efektivitas kebijakan tersebut, baik dari pespektif keadilan maupun efisiensi.

Jadi, institusi kemasyarakatan, rumahtangga, dan ekonomi makro bersama-sama menentukan kesempatan dan prospek hidup seseorang berdasarkan gender. Ketiganya juga merepresentasikan pintu-pintu masuk yang cukup penting bagi kebijakan publik untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih terus bertahan.

Tiga Strategi untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender

KETIDAKSETARAAN GENDER YANG SANGAT MERUGIKAN kemanusiaan dan menghambat prospek pembangunan negara menjadi landasan bagi tindakan privat dan publik untuk meningkatkan kesetaraan gender. Negara memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan baik perempuan maupun laki-laki. Dengan melaksanakan peran ini, negara mendapatkan manfaat sosial yang besar dalam kaitannya dengan peningkatan status perempuan dan anak perempuan baik secara absolut maupun relatif. Aksi publik terutama penting karena institusi sosial dan hukum yang mempertahankan ketidaksetaraan gender luar biasa sulit, atau bahkan tidak mungkin, diubah oleh individual secara sendiri-sendiri. Juga, kegagalan-kegagalan dalam pasar berarti tidak

cukupya informasi tentang produktifitas perempuan dalam pasar tenaga kerja (karena perempuan menghabiskan lebih banyak waktu kerja dalam aktifitas domestik atau karena pasar tenaga kerja tidak ada atau tidak dikembangkan). Hal ini jelas-jelas menjadi hambatan

Memperbaiki efektifitas institusi kemasyarakatan dan mencapai pertumbuhan ekonomi telah secara luas diterima sebagai elemen kunci setiap strategi pembangunan jangka panjang. Namun kesuksesan penerapan strategi ini tidak menjamin kesetaraan gender. Untuk meningkatkan kesetaraan gender, kebijakan untuk melakukan perubahan institusi dan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan dan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hak, sumber daya, dan aspirasi. Dibutuhkan kebijakan dan program yang proaktif untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang telah lama berlangsung antara perempuan dan laki-laki. Bukti yang ada telah memberi cukup dasar bagi diterapkannya tiga langkah strategis untuk meningkatkan kesetaraan gender.

1. Mereformasi Institusi untuk Menetapkan Hak-hak dan Kesempatan yang Sama bagi Perempuan dan Laki-laki

Karena institusi sosial, hukum, dan ekonomi menentukan akses perempuan dan laki-laki ke berbagai sumber daya, kesempatan mereka, dan kemampuan relatif mereka, salah satu unsur kunci untuk meningkatkan kesetaraan gender adalah menetapkan suatu tingkat ‘keleluasaan’ (*playing field*) institusional bagi perempuan dan laki-laki.

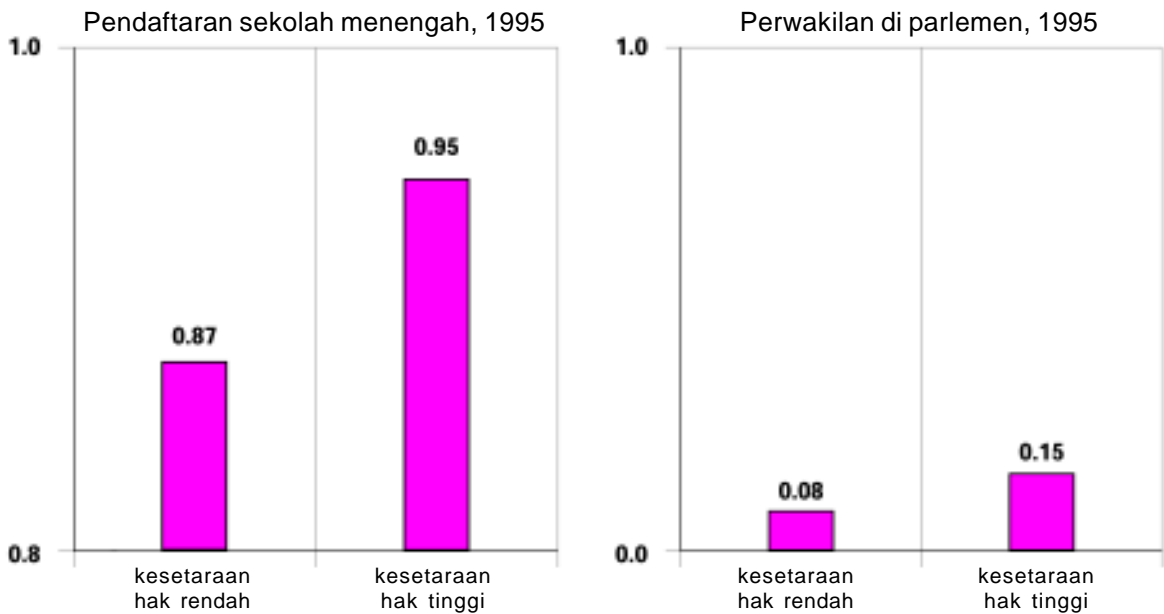
Menjamin Kesetaraan dalam Hak-Hak Dasar. Kesetaraan gender dalam hak merupakan tujuan pembangunan yang memiliki nilainya sendiri. Hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi menyediakan suatu ‘atmosfer’ (environment) yang memungkinkan perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat, mencapai dasar kualitas hidup, dan mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru yang ditawarkan oleh pembangunan. Kesetaraan hak yang lebih besar juga secara konsisten dan sistematis dihubungkan dengan kesetaraan gender yang lebih besar dalam pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik-dampak-dampak yang tidak ada hubungannya dengan pendapatan (gambar 8).

Jika negara-negara di Asia Selatan, Sub-Sahara Afrika, dan Timur Tengah serta Afrika Utara akan meningkatkan kesetaraan gender dalam hak sampai ke tingkat negara yang “paling setara” di wilayah mereka masing-masing, rasio jumlah perempuan dan laki-laki dalam parlemen

akan meningkat lebih dari dua kali lipat di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan akan meningkat lebih dari 60 persen di dua wilayah lainnya. Meskipun peningkatan kesetaraan gender dalam hak memiliki dampak tak seberapa terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan, perbaikan hak yang cukup signifikan dapat mengarah pada tercapainya kesetaraan antara jumlah anak laki-laki dan perempuan yang mendaftar sekolah. Hanya di Asia Selatan kesenjangan gender yang cukup besar dalam jumlah pendaftaran siswa diperkirakan masih terus bertahan, meski terjadi perbaikan besar dalam persamaan hak. Dengan demikian, reformasi hukum berperan penting dalam mewujudkan persamaan hak dan perlindungan antara perempuan dan laki-laki.

Gambar 8. Kesetaraan Hak Lebih Besar-Kesetaraan Sumber Daya dan Aspirasi Lebih Besar

Rasio perempuan terhadap laki-laki



Catatan: Tingkat pendaftaran kasar adalah total pendaftaran pada suatu tingkat sekolah, tanpa memperhatikan usia, yang dinyatakan sebagai persentase terhadap penduduk usia-sekolah yang resmi sesuai dengan tingkat tersebut pada tahun sekolah tertentu. Rasio pendaftaran perempuan terhadap laki-laki adalah rasio pendaftaran kasar perempuan dibagi dengan rasio pendaftaran kasar laki-laki. Untuk perwakilan parlemen, rasionya adalah jumlah kursi yang diduduki perempuan terhadap kursi yang diduduki laki-laki. Skor rata-rata 2,33 atau kurang mewakili persamaan hak yang rendah, skor rata-rata 2,67 atau lebih besar mewakili kesetaraan yang tinggi (lihat catatan 1 pada akhir rangkuman untuk rincian lebih jauh mengenai indeks hak-hak)

Sumber: Data persamaan hak dari Humana (1992); Data parlemen dari WISTAT (1998); data penduduk dari Bank Dunia (1999d)

Namun, reformasi hukum jarang mencukupi. Di banyak negara berkembang, kemampuan untuk melaksanakan reformasi hukum masih lemah karena dipersulit oleh sistem hukum yang berganda dan tidak konsisten. Sebagai contoh, hukum sipil di Uganda mengatur hak-hak yang sama dalam perceraian, tetapi hukum adat lebih kuat pengaruhnya dalam pembagian harta di dalam pernikahan, dan perempuan yang diceraikan tidak dapat mempertahankan akses atas tanah. Dalam kasus-kasus kekerasan berdasarkan gender, syarat-syarat pembuktian yang sulit serta rintangan prosedural lainnya (maupun perilaku penegak hukum) menghambat terwujudnya keadilan di sejumlah negara. Dalam konteks tersebut, upaya untuk memantapkan kemampuan penegakan hukum institusi-institusi yuridis dan administratif negara menjadi unsur penting untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar dalam hak-hak dasar. Di hampir semua kasus, kepemimpinan politik adalah faktor yang menentukan.

Menetapkan Insentif untuk Mengurangi Diskriminasi Gender. Struktur institusi-institusi ekonomi juga secara signifikan mempengaruhi kesetaraan gender. Pasar memuat seperangkat insentif yang cukup kuat mempengaruhi keputusan-keputusan untuk bekerja, menabung, berinvestasi, dan konsumsi. Upah laki-laki dan perempuan, laba dari aset-aset produktif, dan harga barang dan jasa umumnya ditentukan oleh struktur pasar. Bukti-bukti dari Meksiko dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam pasar bebas memperlakukan perempuan lebih baik dan adil dalam hal perekrutan dan jumlah upah daripada perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuasaan pasar yang signifikan yang beroperasi dalam pasar terproteksi. Demikian pula, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan Cina, perempuan menghadapi diskriminasi upah yang lebih besar dalam pekerjaan yang telah diberikan secara administratif daripada dalam pekerjaan yang diperoleh melalui jalur-jalur kompetitif.

Secara garis besar, kebijakan dan investasi yang membuat pasar lebih berkembang dan membenahi ketidaksetaraan gender dalam akses informasi-dikombinasikan dengan pemberlakuan sanksi terhadap mereka yang melakukan diskriminasi-semuanya turut memperkuat insentif bagi kesetaraan gender di pasar tenaga kerja. Di Cina dan Vietnam, misalnya, pengembangan pasar tenaga kerja pedesaan telah benar-benar meningkatkan permintaan akan tenaga kerja perempuan pada perusahaan-perusahaan non-pertanian, membuka lapangan pekerjaan baru dan kesempatan untuk memperoleh penghasilan bagi perempuan.

Merancang pelayanan *service delivery* untuk memfasilitasi kesetaraan akses. Rancangan pelayanan program seperti sistem persekolahan, pusat

perawatan kesehatan, organisasi keuangan, dan program penyuluhan pertanian-dapat memfasilitasi atau menghambat kesetaraan akses antara perempuan dan laki-laki. Lebih jauh lagi, upaya melibatkan masyarakat dalam perancangan pelayanan membantu mengakomodasi permintaan-permintaan khusus dalam konteks lokal, yang seringkali berpengaruh positif terhadap perempuan dalam akses dan pemanfaatan.

Di Bangladesh, Kenya, dan Pakistan jumlah pendaftaran siswa perempuan ke sekolah lebih peka daripada jumlah pendaftaran siswa laki-laki dalam hal kualitas sekolah dan atribut pelayanan lainnya-seperti: keberadaan guru-guru perempuan, sekolah dan fasilitas yang melakukan segregasi gender, dan transportasi yang aman dari dan ke sekolah. Kebijakan yang tanggap atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat secara signifikan meningkatkan minat orangtua untuk menyekolahkan anak-anak perempuannya. Di beberapa wilayah Afrika Barat, “bankir berjalan” (dikenal sebagai pengumpul *susu* di Ghana) membawa pelayanan finansial ke pasar lokal, tempat kerja, dan ke rumah, sehingga menghilangkan kebutuhan perempuan untuk melakukan perjalanan jauh untuk menabung atau meminjam. Di Bangladesh, program kelompok simpan pinjam menggunakan tekanan dari teman satu kelompok sebagai pengganti agunan bank tradisional untuk menjamin pembayaran kembali. Kedua rancangan pelayanan tersebut telah meningkatkan akses perempuan atas sumber-sumber finansial.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Memantapkan Insentif demi Kesetaraan Sumber Daya dan Partisipasi

Di sebagian besar negara, perkembangan ekonomi dikaitkan dengan perbaikan keadaan bagi perempuan dan anak-anak perempuan, serta dengan peningkatan kesetaraan gender-dijalankan melalui beberapa jalur:

- Rumahtangga membuat keputusan mengenai pekerjaan, konsumsi, dan investasi antara lain untuk menanggapi tingkat harga dan indikator pasar lainnya. Perubahan pada indikator tersebut cenderung mengakibatkan realokasi sumber daya. Bila perkembangan ekonomi meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan umum, seperti klinik kesehatan dan sekolah, biaya investasi rumahtangga tersebut untuk sumber daya manusia jadi berkurang. Jika biaya investasi yang dikeluarkan lebih banyak menurun bagi perempuan daripada laki-laki, atau jika investasi pada perempuan lebih sensitif terhadap perubahan harga daripada

investasi pada laki-laki, maka perempuan akan mendapat lebih banyak manfaat dari terjadinya peningkatan pelayanan umum.

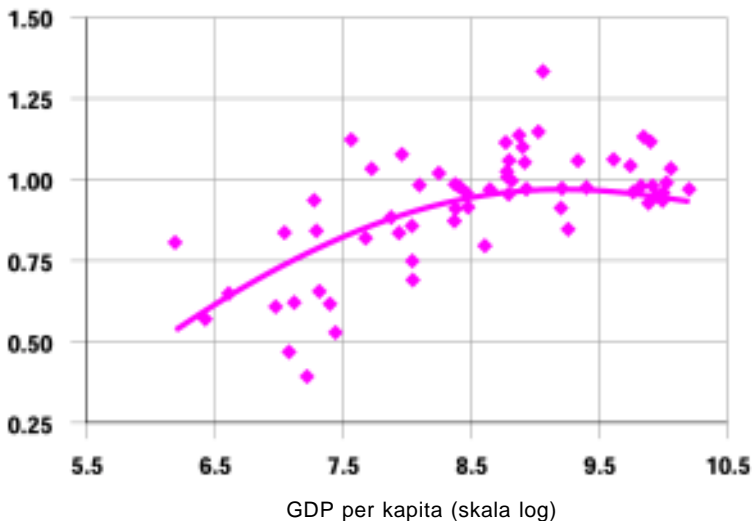
- Ketika perkembangan ekonomi meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan gender cenderung menurun. Rumahtangga-rumahtangga berpenghasilan rendah dipaksa untuk menjatah pengeluaran untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan gizi di mana perempuan dan anak perempuan yang “dikorbankan” karena merekalah yang menanggung sebagian besar beban. Oleh sebab itu, ketika pendapatan rumahtangga bertambah, ketidaksetaraan gender dalam sumber daya manusia cenderung menurun.

Sebagaimana hak-hak dasar lainnya, pendapatan yang lebih tinggi umumnya menghasilkan kesetaraan gender dalam sumber daya, baik kesehatan maupun pendidikan (gambar 9). Di bidang pendidikan, hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan terbesar yang ditimbulkan oleh pertumbuhan pendapatan kemungkinan akan terjadi di wilayah-wilayah

Gambar 9. Kesetaraan Gender dalam bidang Pendidikan Membaik Sejalan Peningkatan Pendapatan

Pendaftaran sekolah menengah, 1995

Rasio perempuan terhadap laki-laki



Catatan: Tingkat pendaftaran kasar adalah total pendaftaran pada suatu tingkat sekolah, tanpa memperhatikan usia, yang dinyatakan sebagai persentase terhadap penduduk usia-sekolah yang resmi sesuai dengan tingkat tersebut pada tahun sekolah tertentu. Rasio pendaftaran perempuan terhadap laki-laki adalah rasio pendaftaran kasar perempuan dibagi dengan rasio pendaftaran kasar laki-laki.

Sumber: Bank Dunia (1999).

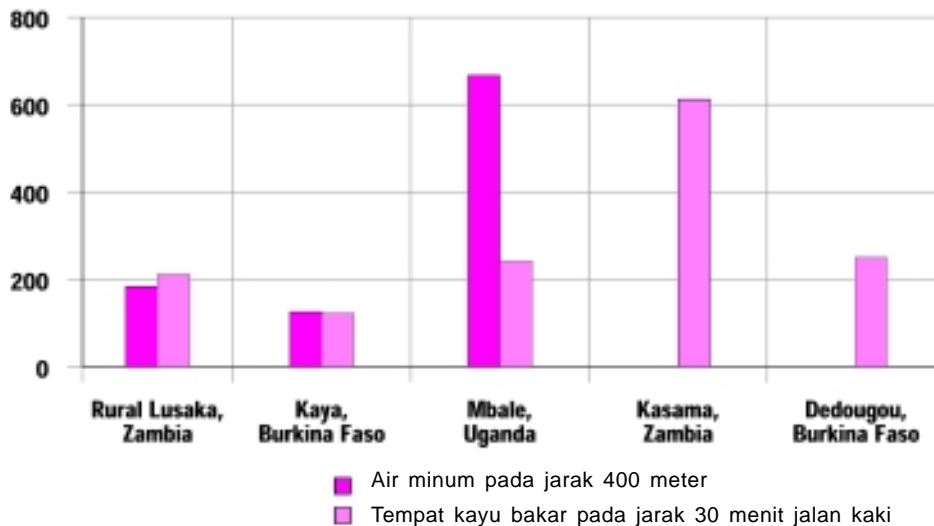
termiskin: Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika, bahkan dampak pendapatan khususnya kuat pada tingkat sekunder. Namun, analisis simulasi juga menunjukkan bahwa peningkatan yang sangat besar dalam pendapatan-katakanlah ke level rata-rata OECD-dibutuhkan untuk mencapai atau mendekati kesetaraan gender dalam pendaftaran ke sekolah menengah di wilayah-wilayah ini. Peningkatan seperti itu tidaklah realistis dalam jangka pendek maupun menengah. Peningkatan pendapatan yang sangat besar juga merupakan syarat mutlak untuk mendorong tercapainya kesetaraan gender di dalam perwakilan di parlemen.

- Ketika pembangunan ekonomi memperluas kesempatan kerja, terjadi peningkatan dalam tingkat pengembalian (*rate of return*) sumber daya manusia yang diharapkan, dan memperkuat insentif bagi rumahtangga untuk melakukan investasi dalam kesehatan dan pendidikan anak perempuan. Selain itu, memperkuat insentif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Dengan perubahan insentif pekerjaan, pembangunan ekonomi mempengaruhi kesetaraan gender.
- Pembangunan ekonomi mengakibatkan munculnya pasar tenaga kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan demikian, hal tersebut tidak hanya menciptakan atau memperkuat indikator pasar tentang keuntungan yang didapat dari tenaga kerja tetapi juga mengurangi inefisiensi dalam ekonomi. Sebagai contoh, di mana terdapat pasar tenaga kerja yang berjalan baik, tenaga kerja yang dikontrak dapat menjadi substitusi bagi tenaga kerja perempuan keluarga, baik di bidang pertanian atau pengelolaan rumahtangga dan dalam aktivitas perawatan. Hal ini memungkinkan rumahtangga untuk menggunakan waktu secara efisien, dan mungkin mengurangi beban kerja perempuan. Di tempat-tempat di mana pasar tenaga kerja tidak ada atau tidak berjalan dengan baik, substitusi semacam itu tidaklah dimungkinkan.
- Pertumbuhan ekonomi umumnya dibarengi oleh ekspansi investasi dalam infrastruktur seperti: air bersih, jalan raya, transportasi, dan bahan bakar. Hal ini cenderung mengurangi waktu yang diperlukan perempuan untuk mengurus rumahtangga. Di Burkina Faso, Uganda, dan Zambia, misalnya, perempuan dapat menghemat ratusan jam setahun jika waktu perjalanan ke sumber-sumber bahan bakar dan air minum dikurangi menjadi 30 menit atau kurang (gambar 10). Pembangunan infrastuktur ekonomi secara signifikan mengurangi waktu bagi perempuan mengurus rumahtangga, memperbaiki tingkat kesehatan mereka, memperluas partisipasi mereka dalam mencari pendapatan tambahan, dan membuka kesempatan bersekolah bagi anak-anak perempuan.

Meskipun pembangunan ekonomi cenderung meningkatkan kesetaraan gender, dampaknya tidaklah mencukupi dan tidaklah bisa langsung kelihatan. Dan tidak pula berjalan otomatis. Dampak pembangunan ekonomi terhadap kesetaraan gender sebagian besar tergantung pada hak-hak, akses atas berbagai sumber daya produktif (seperti tanah dan kredit), dan partisipasi politik. Lebih dari itu, kebijakan-kebijakan sosial yang memberantas diskriminasi di pasar tenaga kerja atau mendukung perawatan anak-anak akan mengurangi ketidaksetaraan gender-sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh pembangunan ekonomi saja. Hal itu ditunjukkan lewat pengalaman sejumlah negara yang memiliki pertumbuhan tinggi di Asia Timur, dan negara-negara yang sedang menyesuaikan diri di Amerika Latin dan Sub-Sahara Afrika. Kebijakan-kebijakan perlindungan sosial, yang mengakui perbedaan gender dalam pekerjaan berbasis-pasar dan rumahtangga dan perbedaan dalam risiko adalah penting guna melindungi perempuan (dan laki-laki) terhadap goncangan ekonomi atau krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Gambar 10. Investasi dalam Prasarana Air Bersih dan Bahan Bakar Dapat Secara Signifikan Mengurangi Waktu yang Diperlukan dalam Pengambilan Air Bersih dan Bahan Bakar

Jam Rata-rata penghematan waktu per rumah tangga per keluarga

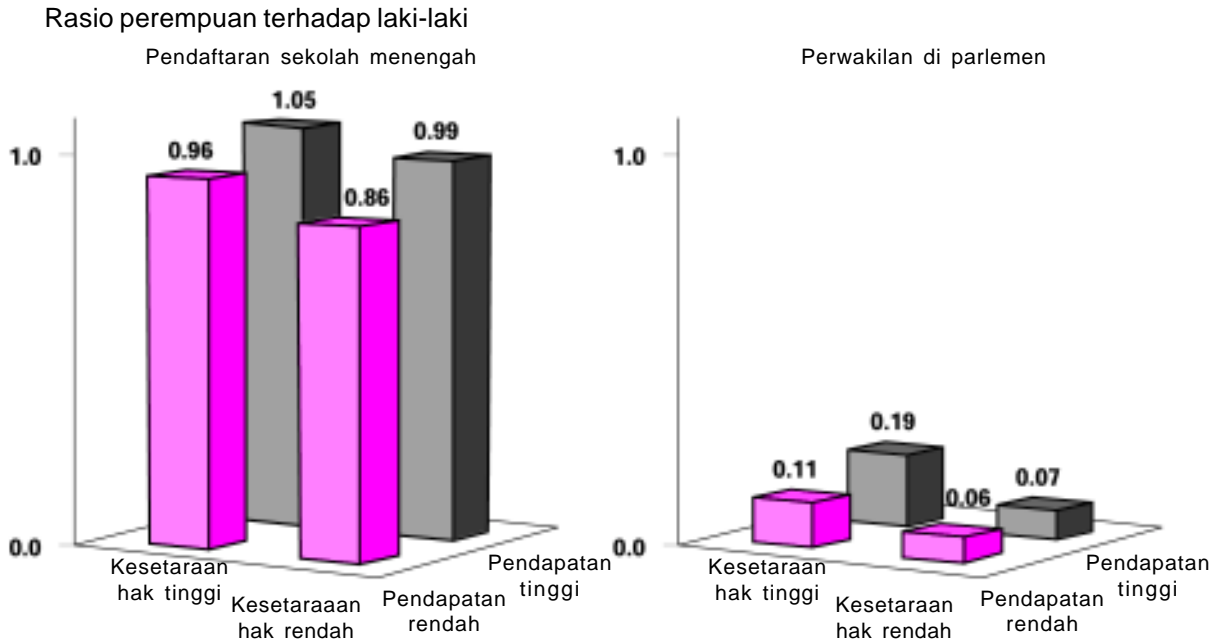


Catatan: Kasama dan Dedougou sudah berada dalam target 400-meter untuk mencapai air minum. Di bagian-bagian Sub-Sahara Afrika perempuan menggunakan dua pertiga atau lebih waktu keluarga untuk mengambil air dan bahan bakar, sedangkan anak-anak, umumnya anak perempuan, menggunakan tambahan 5-28 persen.

Sumber: Barwell 1999.

Belakangan ini, perdebatan mengenai gender dan pembangunan terbagi atas dua kubu. Kubu pertama adalah mereka yang mengedepankan pendekatan-pendekatan pembangunan berorientasi pertumbuhan. Kubu kedua, adalah mereka yang mengedepankan pendekatan-pendekatan berdasarkan hak atau institusi. Namun, banyak bukti menunjukkan bahwa baik pertumbuhan ekonomi maupun perubahan institusional keduanya merupakan elemen penting bagi strategi jangka panjang meningkatkan kesetaraan gender. Sebagai contoh, jika pendapatan per kapita dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan rendah, baik peningkatan kesetaraan hak maupun pendapatan akan meningkatkan kesetaraan gender di bidang pendidikan. Peningkatan hak dan pendapatan akan menghasilkan keuntungan yang bahkan lebih besar (gambar 11).

Gambar 11. Ketidaksetaraan Gender dalam Hak-Hak dan Pertumbuhan Pendapatan Meningkatkan Kesetaraan Gender pada Banyak Dimensi—Dari Pendidikan hingga Perwakilan Politik



Catatan: Angka-angka didasarkan atas simulasi yang diambil dari hasil regresi ganda, dengan mengendalikan pendapatan dan hak. Angka rata-rata 2,33 atau kurang mewakili kesetaraan hak yang rendah, angka rata-rata 2,67 atau lebih tinggi mewakili kesetaraan yang tinggi (lihat catatan 1 di akhir rangkuman untuk rincian lebih jauh mengenai indeks hak-hak). Negara-negara berpenghasilan rendah dan tinggi dikelompokkan menurut nilai rata-rata GDP per kapita. Semua nilai merupakan rata-rata yang didasarkan pada populasi untuk tiap kategori.

Sumber: Data mengenai hak-hak dari Humana (1992); Data parlemen dari WISTAT (1998); data lainnya dari Bank Dunia (1999).

Reformasi institusional yang memantapkan hak-hak serta kebijakan-kebijakan dasar yang mendorong pembangunan ekonomi dapat saling

memperkuat satu sama lain. Di Sub-Sahara Afrika, penetapan hak-hak atas tanah bagi perempuan meningkatkan produktivitas bidang-bidang tanah yang dikelola perempuan-meningkatkan pendapatan perempuan yang bersangkutan maupun pendapatan keluarganya. Begitu pula, akses yang terbuka lebar bagi perempuan pada institusi-institusi perbankan juga meningkatkan status dan stabilitas ekonomi mereka serta turut memperbaiki kesejahteraan rumahtangga. Di Bangladesh, seiring meningkatnya kemampuan perempuan untuk meminjam modal dalam program-program mikro-kredit, maka meningkat pula status dan posisi tawar mereka dalam keluarga, demikian pula halnya dengan konsumsi rumahtangga (pendapatan).

3. Mengambil Langkah Kebijakan Pro Aktif untuk Mengatasi Ketidaksetaraan Gender dalam Penguasaan Sumber Daya dan Partisipasi Politik

Karena efek dari kombinasi antara reformasi institusional dan pembangunan ekonomi biasanya lama baru kelihatan hasilnya, langkah-langkah aktif seringkali diperlukan untuk jangka pendek atau menengah. Langkah-langkah aktif yang dimaksud adalah tindakan bertahap dan konkret yang ditujukan untuk mengatasi diskriminasi gender, baik dalam rumahtangga, masyarakat, maupun tempat kerja. Hal semacam itu mempercepat kemajuan dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih terus bertahan. Selain itu, juga berguna dalam memfokuskan diri pada sub-populasi tertentu, misalnya kaum miskin, yang masih mengalami ketidaksetaraan gender.

Karena sifat dan ruang lingkup ketidaksetaraan gender sangat bervariasi di berbagai negara, intervensi yang dianggap memadai juga akan bervariasi dari satu konteks ke konteks lain. Keputusan mengenai apakah negara perlu melakukan intervensi dan langkah-langkah apa yang hendaknya diambil harus berdasarkan pemahaman dan analisa situasi lokal. Berhubung langkah-langkah aktif membutuhkan sumber biaya, para pembuat kebijakan perlu selektif dalam menentukan langkah apa saja yang akan dijalankan. Misalnya, secara strategis memfokuskan diri pada bidang-bidang di mana intervensi pemerintah memberi manfaat sosial terbesar. Hal ini secara implisit berarti memfokuskan diri pada wilayah dimana kegagalan pasar dan dampak-dampak yang berlebihan kemungkinan berlangsung paling parah. Hal ini juga berarti memfokuskan diri pada bidang-bidang di mana sektor swasta tidak mungkin melakukan suatu upaya secara mandiri-atau mampu melakukan upaya dengan baik.

Di luar persoalan perlu tidaknya intervensi khusus, pilihan tetap harus dibuat mengenai bagaimana persisnya negara harus melakukan intervensi. Contohnya, apakah penyediaan barang dan pelayanan publik secara langsung diperlukan? Atau bisakah tujuan-tujuan serupa direalisasikan secara efektif melalui lebih banyaknya penyediaan informasi, upaya-upaya manajerial dan pelaksanaan, atau melalui subsidi publik bagi para penyedia swasta?

Laporan ini memfokuskan diri pada empat bidang utama kebijakan :

Meningkatkan kesetaraan gender dalam akses ke berbagai sumber daya produktif dan kapasitas pendapatan. Upaya-upaya untuk memperbesar kesetaraan dalam mengakses dan mengendalikan berbagai sumber daya produktif-apakah itu pendidikan, sumber-sumber finansial, ataupun tanah-dan untuk menjamin akses yang setara dan adil atas kesempatan kerja dapat memajukan kesetaraan gender maupun meningkatkan efisiensi ekonomi. Para pembuat kebijakan memiliki sejumlah “pintu” masuk potensial untuk melakukan intervensi :

- Mengurangi biaya pendidikan, menanggapi keprihatinan orangtua terhadap kelayakan dan keamanan anak perempuan, dan meningkatnya penghasilan rumah tangga dari penanaman investasi pada pendidikan perempuan melalui kemajuan kualitas pendidikan, semuanya itu dapat mengatasi hambatan sosial dan ekonomi di bidang pendidikan anak perempuan. Bahkan, pada masyarakat yang masih sangat patriarkis sekalipun. . .
- Merancang institusi keuangan dengan berbagai cara yang mempertimbangkan kendala-kendala khas gender-baik dengan menggunakan tekanan anggota kelompok untuk menggantikan bentuk-bentuk agunan tradisional, dengan menyederhanakan prosedur perbankan, ataupun dengan menyediakan jasa pelayanan keuangan yang lebih dekat ke rumah, pasar, dan tempat kerja-dapat meningkatkan akses perempuan pada proses perbankan seperti tabungan dan kredit.
- Reformasi tanah yang mengatur hak milik bersama bagi suami dan istri atau yang memungkinkan perempuan untuk memegang secara otonom hak milik atas tanah, dapat meningkatkan kontrol perempuan atas tanah yang diatur oleh undang-undang. Di mana hukum adat dan hukum positif berjalan seiring, interaksi antar keduanya perlu diperhatikan jika ingin berhasil dalam upaya untuk memantapkan akses perempuan atas bidang pertanahan.
- Di negara-negara yang pasar tenaga kerjanya dan kemampuan penegakan hukumnya relatif berkembang, program-program

penyediaan lapangan kerja dapat meningkatkan akses perempuan ke pekerjaan di sektor formal. Di mana terdapat diskriminasi yang serius dalam perekrutan dan promosi, tindakan afirmatif (*affirmative action*) juga dapat meningkatkan produktifitas dalam perusahaan-perusahaan dan dalam perekonomian.

Mengurangi kerugian yang diderita perempuan karena peran rumahtangga mereka. Di hampir semua masyarakat, norma-norma gender menyatakan bahwa perempuan dan anak-anak perempuan memikul tanggung jawab utama mengurus masalah rumahtangga. Di negara-negara berkembang, tanggung jawab rumahtangga seringkali menuntut jam kerja panjang yang membatasi kesanggupan anak-anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Di samping itu juga menghambat kesempatan para ibu untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Beberapa jenis intervensi dapat mengurangi kerugian yang diderita perempuan karena tanggung jawab rumahtangga mereka.

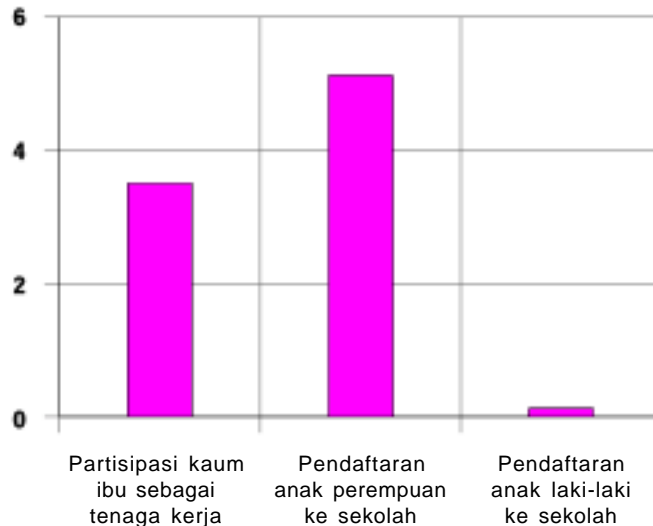
- Intervensi yang meningkatkan pendidikan, upah, dan partisipasi pasar tenaga kerja-ditambah dengan akses yang memadai ke pelayanan kesehatan reproduksi dan rumahtangga berencana-semuanya memantapkan peran perempuan dalam membuat keputusan tentang masalah reproduksi. Namun, karena perempuan dan laki-laki mungkin memiliki pilihan yang berbeda tentang ukuran besarnya rumahtangga dan penggunaan kontrasepsi, program keluarga berencana perlu menggapai baik laki-laki maupun perempuan sebagai sasarannya.
- Memberi dukungan publik bagi pelayanan perawatan anak di luar rumah dapat mengurangi biaya perawatan, sehingga memperluas partisipasi dalam bidang ekonomi bagi perempuan dan pendidikan bagi remaja perempuan. Di Kenya pengurangan biaya perawatan anak secara signifikan meningkatkan upah kerja bagi para ibu dan meningkatkan pendidikan bagi remaja perempuan. (gambar 12).
- Undang-undang pasar tenaga kerja yang sifatnya melindungi seringkali menjadi pedang bermata dua: merugikan sekaligus memberi manfaat bagi perempuan yang bekerja di sektor formal. Misalnya, sewaktu perusahaan dituntut menanggung seluruh biaya persalinan, perusahaan mungkin mengeluarkan keputusan perekrutan yang diskriminatif terhadap perempuan. Ketika seluruh biaya ditanggung perempuan, maka insentif bagi perempuan untuk terus bekerja menurun. Langkah-langkah yang membantu membagi beban biaya persalinan dan biaya perawatan lainnya pada pemilik modal, pekerja, dan bahkan negara sangat bermanfaat bagi perempuan serta keluarganya.
- Penanaman investasi pada penyediaan air, bahan bakar, transportasi,

dan prasarana penghemat-waktu lainnya dapat mempercepat pengurangan beban kerja domestik perempuan dan anak perempuan, khususnya di daerah-daerah pedesaan yang miskin-membebasikan anak perempuan untuk bersekolah dan perempuan dewasa untuk melakukan aktifitas lainnya, baik yang berkaitan dengan pemerolehan pendapatan maupun urusan kemasyarakatan. .

Gambar 12. Perawatan Anak Berbiaya-Rendah Berarti Lebih Banyak Perempuan di Dalam Pasar Tenaga Kerja, Lebih Banyak Anak Perempuan Bersekolah

Peningkatan partisipasi tenaga kerja kaum ibu dan pendaftaran sekolah anak-anak (usia 8-16 th) di Kenya akibat turunnya biaya perawatan anak di luar rumah sebesar 10 persen

Persen



Sumber: Lokshin, Glinskaya, dan Garcia 2000.

Menyediakan perlindungan sosial yang layak gender. Perempuan dan laki-laki menghadapi risiko-risiko khas gender semasa krisis ekonomi atau reformasi kebijakan. Perempuan mengendalikan lebih sedikit sumber daya yang dapat dijadikan pegangan. Sementara laki-laki, sebagai pencari nafkah tradisional, rawan terhadap stres berkaitan dengan ketidakpastian pekerjaan. Memperhitungkan perbedaan-perbedaan gender dalam hal risiko dan kerawanan adalah sangat penting dalam merancang program perlindungan sosial karena perempuan dan laki-laki dalam rumahtangga yang sama tidak berbagi risiko yang sama.

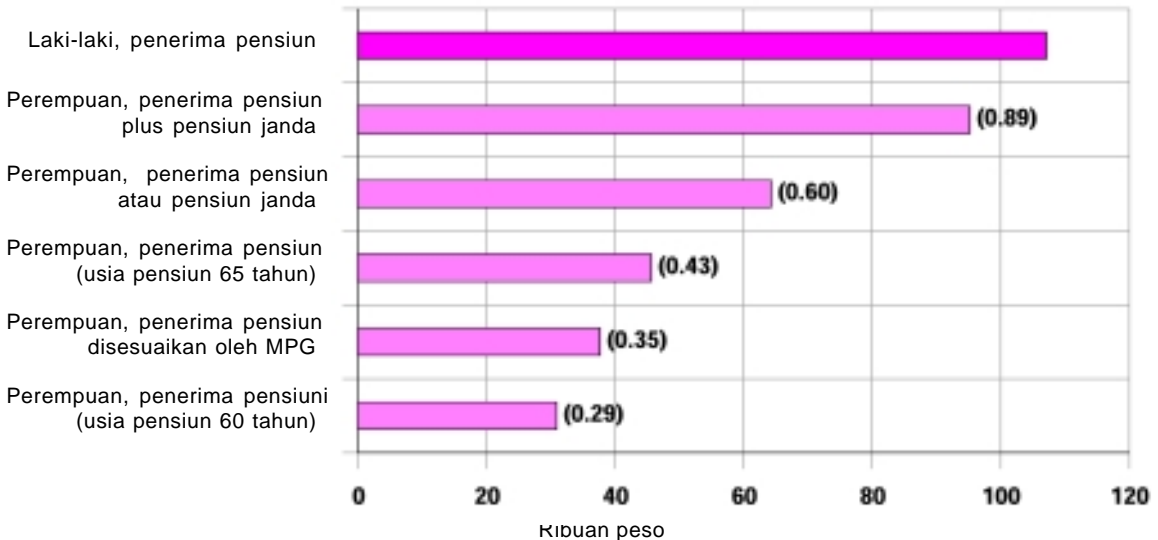
- Untuk melindungi baik laki-laki maupun perempuan, program-pro-

gram perlindungan sosial perlu memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan bias gender dalam partisipasi dan keuntungan yang didapat. Misalnya, program jaring pengaman sosial telah seringkali (kendatipun tidak sengaja) mengesampingkan perempuan karena tidak memperhitungkan perbedaan-perbedaan gender dalam pola penyediaan tenaga kerja, akses informasi, atau jenis pekerjaan yang dipandang pantas baik oleh laki-laki maupun perempuan.

- Program-program jaminan hari tua yang tidak memperhitungkan perbedaan-perbedaan gender dalam lapangan pekerjaan, pencarian nafkah, dan harapan hidup berisiko membiarkan perempuan-terutama janda-menjadi rawan kemiskinan di usia tuanya. Penelitian baru-baru ini di Cili menunjukkan bahwa santunan pensiun perempuan relatif terhadap laki-laki, sangatlah sensitif terhadap ciri-ciri rancangan tertentu dari sistem jaminan hari tua. (gambar 13).

Gambar 13. Rancangan Pensiun Mempengaruhi Santunan Relatif bagi Perempuan dan Laki-Laki Lanjut Usia

Santunan penghasilan pensiun bagi pekerja perempuan dan laki-laki yang tidak tamat pendidikan dasar di Cili (rasio perempuan terhadap laki-laki dalam kurung)



Catatan: Perkiraan-perkiraan ini berasumsi bahwa laki-laki pensiun pada usia 65 tahun dan perempuan pada usia 60 tahun (usia pensiun menurut undang-undang bagi laki-laki dan perempuan) kecuali dinyatakan lain. MPG berarti jaminan pensiun minimum yang didukung pemerintah. Angka-angka dihitung sebagai anuitas bulanan bagi kontributor perkotaan, dengan asumsi tingkat pengembalian 5 persen dan 2 persen pertumbuhan upah sekuler. Laki-laki diasumsikan terus hidup sampai 15 tahun setelah pensiun (pada usia 65) dan membuat pengaturan bagi pensiun istrinya selama 6 tahun sebesar 60 persen dari anuitas mereka sendiri. Bila perempuan pensiun pada usia 60, mereka diasumsikan terus hidup selama 23 tahun, dan bila mereka pensiun pada usia 65 tahun, mereka diasumsikan terus hidup selama 19 tahun.

Sumber: Diadaptasi dari Cox-Edwards 2000.

Memantapkan aspirasi dan partisipasi politik perempuan. Perubahan-perubahan institusional yang menetapkan kesetaraan gender dalam hak-hak dasar merupakan landasan utama partisipasi politik. Demikian pula, kebijakan-kebijakan dan program-program yang meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan dan akses ke informasi (termasuk sadar hukum) dapat memperkuat partisipasi mereka dalam arena politik. Namun, seperti halnya dampak pembangunan ekonomi yang lebih luas, langkah-langkah ini membutuhkan waktu lama sebelum dapat dipetik hasil yang nyata.

Pengalaman baru-baru ini di lebih 30 negara, termasuk Argentina, Ekuador, India, Filipina, dan Uganda, menunjukkan bahwa kuota politik bisa efektif dalam meningkatkan partisipasi dan perwakilan politik pada majelis lokal dan nasional dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perundang-undangan yang mengatur kuota berbeda dari satu negara ke negara lain, tetapi umumnya menetapkan bahwa ada jumlah atau proporsi minimum dari kandidat partai politik atau kursi yang diperebutkan dalam dewan perwakilan lokal atau nasional yang diperuntukkan bagi perempuan.

Tantangan bagi Masa Depan-Langkah ke Depan

BERBAGAI BUKTI DALAM LAPORAN INI MEMBANGUN kasus yang memaksa negara untuk melakukan intervensi guna meningkatkan kesetaraan gender. Memang, negara, kelompok masyarakat sipil, dan komunitas internasional, semuanya memainkan peran penting dalam memerangi diskriminasi gender, sehingga masyarakat dapat memperoleh banyak manfaat. Tetapi tetap terdapat beberapa tantangan penting.

Mempertajam Kebijakan Melalui Analisa Gender

Cara untuk memperdalam pemahaman relasi antara kesetaraan gender dengan pembangunan, dan cara untuk merefleksikan relasi ini dalam berbagai kebijakan merupakan tantangan utama pada masa kini maupun masa depan. Laporan ini mengumpulkan banyak sekali bukti tentang relasi ini, meski masih banyak yang harus diteliti dan dipahami, yang berarti pula masih diperlukan pengumpulan data yang lebih banyak dan lebih baik serta analisis yang kesemuanya didisagregasi berdasarkan gender. Dua bidang yang akan dianalisa lebih lanjut:

- Apa saja dampak berbagai kebijakan makro dan sektoral terhadap gender? Dan bagaimana pilihan dalam pengeluaran untuk pelayanan publik meningkatkan atau menghambat kesetaraan gender dan efisiensi ekonomi? Para pembuat kebijakan menghadapi berbagai permintaan yang saling bersaing akan sumber daya dan perhatian publik, dengan anggaran fiskal dan administratif yang ketat. Dengan kendala yang ada, informasi dan analisa dapat membantu pemerintah mencapai keuntungan sosial secara maksimal dari berbagai intervensi yang mereka jalankan berkaitan dengan gender. Lagi pula, karena sifat kesenjangan gender berlainan dalam masyarakat, kebijakan yang efektif perlu didasarkan pada suatu analisa yang mengintegrasikan berbagai persoalan gender baik lokal maupun nasional.
- Di masa-masa mendatang penting untuk dipikirkan bagaimana berbagai kebijakan dan program mempengaruhi berbagai indikator umum pembangunan (seperti pendidikan, kesehatan, atau indikator-indikator tenaga kerja). Juga bagaimana intervensi pemerintah meningkatkan otonomi, kepemimpinan dan aspirasi perempuan, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat untuk memahami intervensi-intervensi yang paling efektif dibutuhkan lebih banyak analisa gender.

Menangani Berbagai Masalah yang Muncul

Tantangan lain yang dihadapi adalah para pembuat kebijakan hendaknya memikirkan jauh ke depan menghadapi berbagai keadaan yang cepat berubah. Dilihat dari perspektif gender, sebenarnya banyak masalah yang bermunculan yang membutuhkan perhatian lebih besar dari para pembuat kebijakan dan para peneliti diantaranya globalisasi, desentralisasi dalam pemerintah, penyebaran HIV/AIDS, dan proses penuaan penduduk dunia. Misalnya:

- Dengan menurunnya angka kelahiran dan semakin tingginya harapan hidup manusia, penduduk dunia pun menua. Hal ini, antara lain, akan mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah para janda di seluruh dunia selama abad ke-21. Apakah implikasi pergeseran demografik ini terhadap perlindungan sosial, kesehatan dan bidang-bidang kebijakan publik lainnya? Memahami berbagai implikasi kebijakan yang ditimbulkan oleh gejala demografik ini akan menjadi salah satu tantangan penting bagi penelitian di masa mendatang.

- Demikian pula, globalisasi dan berbagai revolusi informasi baru sedang mengubah bagaimana produksi tertata dan informasi terdistribusi di seluruh dunia. Akankah perubahan-perubahan ini mempercepat jalan menuju kesetaraan gender atau memperlebar kesenjangan gender dalam kesempatan ekonomi? Pemahaman yang lebih baik tentang berbagai kesempatan dan risiko yang berhubungan dengan kekuatan-kekuatan ini merupakan tantangan lain bagi para peneliti dan pembuat kebijakan.

Memperluas Kemitraan

Tantangan ketiga yang menentukan adalah bagaimana para pembuat kebijakan, dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesetaraan gender, memperluas kemitraan mereka dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, para donor, dan lain sebagainya dalam komunitas internasional. Meskipun para pembuat kebijakan memainkan peran penting, upaya-upaya mengatasi kesenjangan gender dapat ditingkatkan melalui kerja sama aktif antar berbagai organisasi sipil dan internasional. Komunitas donor dapat menyumbang dengan mendukung pengumpulan dan analisis data yang dipilah berdasarkan gender, dengan memasukkan analisa gender dalam diskusi mereka dengan para pembuat kebijakan nasional. Demikian pula, kelompok-kelompok sipil dan para peneliti setempat dapat menyumbangkan informasi penting serta analisa berdasarkan pengetahuan lokal yang akan menjadi masukan penting bagi kebijakan pemerintah.

Mendorong partisipasi yang lebih besar serta transparansi dalam pembuatan kebijakan dapat berpengaruh sangat positif baik bagi kesetaraan gender maupun pembangunan nasional secara keseluruhan. Membuka wacana publik dan membuat kebijakan untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari kelompok perempuan dapat memberdayakan perempuan, dan meningkatkan hasil berbagai kebijakan maupun program. Temuan-temuan hasil penelitian tentang relasi antara partisipasi publik perempuan yang luas serta tingkat-tingkat korupsi yang lebih rendah sungguh penting untuk diperhatikan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dengan pertukaran gagasan yang lebih leluasa, transparansi yang lebih jelas dalam pembuatan kebijakan, dan partisipasi perempuan yang semakin luas dalam ruang publik maka kebijakan pembangunan dapat semakin efektif.

Catatan

1. Indikator tentang hak-hak pada gambar 1, 8 dan 11 adalah hasil rata-rata dari tiga indeks kesetaraan gender dalam hak-hak yang dikumpulkan untuk lebih dari 100 negara oleh Humana (1992). Indeks hak perorangan memfokuskan diri pada kesetaraan gender mengenai hak politik dan hukum, hak dalam sosial dan ekonomi, serta hak legal dalam hukum perkawinan dan perceraian. Indeks-indeks ini dikonstruksi dengan menggunakan metodologi yang konsisten di semua negara di mana lingkup hak-hak diuji (dengan skala dari 1 sampai 4) terhadap hak seperti yang dirinci dalam beberapa instrumen HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lihat lampiran laporan lengkap buku ini untuk keterangan tentang negara-negara yang termasuk pada gambar 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 dan 11. Lihat lampiran 2 dalam laporan utama untuk hasil-hasil regresi yang menjadi dasar bagi gambar 3, 8, 9, 11.

Daftar Isi Laporan

Pendahuluan

Pengantar

Tim Pelapor

Rangkuman

Kesetaraan Gender-dalam Hak-Hak, Sumber Daya, dan Kebebasan Berpendapat

Meski Ada Kemajuan, Ketidaksetaraan Gender Tetap Terjadi di Semua Negara

Ketidaksetaraan Gender Paling Banyak Terjadi di antara Kaum Miskin
Ketidaksetaraan Gender Menurunkan Kesejahteraan dan Menghambat Pembangunan

Mengapa Ketidaksetaraan Gender Masih Tetap Terjadi?

Tiga Strategi untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender

Tantangan bagi Masa Depan-Langkah ke Depan

1. Ketidaksetaraan Gender di awal Abad 21

Definisi Kesetaraan Gender

Pola Regional Ketidaksetaraan Gender dalam Hak, Sumber Daya dan Aspirasi

Pola Ketidaksetaraan Gender di Berbagai Wilayah dan Negara Gender dan Kemiskinan

2. Ketidaksetaraan Gender Menghambat Pembangunan

Akibatnya terhadap Kesejahteraan

Akibatnya terhadap Produktivitas dan Pertumbuhan

Akibatnya terhadap Pemerintahan

Mengapa Ketidaksetaraan Gender Masih terjadi: Suatu

Kerangkakerja

Peran Pemerintah dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender

3. Norma-norma Sosial, Hukum dan Institusi Ekonomi

Gender dalam Norma dan Adat Istiadat

Hak-hak dan Hukum

Institusi Ekonomi

Perubahan Institusional: Bagaimana caranya?

4. Kekuasaan, Insentif dan Sumber Daya dalam Rumahtangga

Apakah Rumahtangga itu?
 Rumahtangga Menghasilkan Peran Gender
 Penguasaan atas Sumber Daya dan Kuatnya Posisi Tawar
 Mempengaruhi Alokasi Rumahtangga
 Insentif Kebijakan dan Investasi Publik Mempengaruhi Hasil Gender

5. Apakah Pembangunan Ekonomi Positif bagi Kesetaraan Gender?

Membongkar Pembagian Kerja yang Kaku Berdasarkan Gender
 Memperkuat Insentif untuk Investasi yang Setara dalam Sumber Daya Manusia
 Mengurangi Diskriminasi Melalui Pasar yang Kompetitif
 Pertumbuhan dengan Kesetaraan Gender: Apa yang Ditemukan dalam Kajian Makro
 Apakah Pola Pembangunan Mengarah pada Kesetaraan Gender?
 Pandangan Regional

6. Menerapkan Tiga Strategi untuk Mempromosikan Kesetaraan Gender

Reformasi Institusi untuk Membangun Hak dan Kesempatan yang Setara antara Perempuan dan Laki-laki
 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi untuk Memperkuat Insentif bagi Sumber Daya yang lebih Setara
 Mengambil Langkah-langkah Aktif untuk mengatasi Ketidaksetaraan yang masih Terjadi dalam Kontrol atas Sumber Daya dan Aspirasi Politik
 Tantangan bagi Masa Depan – Langkah ke Depan

Lampiran

Lampiran 1 : Catatan dan Cakupan Negara untuk Pembuatan Gambar
 Lampiran 2 : Model Regresi Dasar Lintas-Negara dan Estimasi Koefisien
 Lampiran 3 : Pendapatan Relatif Perempuan dan Laki-laki yang Disesuaikan untuk Perbedaan dalam Sumber Daya Manusia
 Lampiran 4 : Uji Empiris dari Model Rumahtangga yang “Terpadu”
 Lampiran 5 : Simulasi Pendidikan

Daftar Pustaka

Silahkan mengisi formulir pemesanan di halaman berikut ini jika tertarik untuk memesan versi lengkap Bahasa Inggris dari buku *Engendering Development : Through Gender Equality in Rights, Resources and Voices*. Dalam waktu dekat, versi lengkap buku ini juga akan diterbitkan dalam edisi Bahasa Indonesia.

ORDER FORM

Title	Stock #	Price	Qty.	Total US\$
Engendering Development—Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice <i>A Copublication of the World Bank and Oxford University Press. (ISBN 0-19-521596-6)</i>	D61596	\$35		

* Shipping and Handling charges are \$8.00 per order. If a purchase order is used, actual shipping will be charged.

For air mail delivery outside the United States, charges are \$13.00 for one item plus \$6.00 for each additional item.

Subtotal	
Shipping and Handling*	
Total US\$	

Name _____
 Title _____
 Organization _____
 Address _____
 City _____
 State _____
 Zip/Postal Code _____
 Country _____
 Phone _____
 Fax _____
 E-mail _____

Check no. _____

in the amount of \$ _____ is enclosed. When ordering directly from the World Bank, make check payable in U.S. funds only drawn on a U.S. bank to: The World Bank. Please send your check with your order.

Charge \$ _____ to my:

American Express Mastercard Visa

Card no. _____

Expiration date _____

Name _____
as it appears on the card (required for all credit card charges)

Signature _____

Institutional customers in the U.S. only:

Bill me. Please include purchase order.

Mail order to:

World Bank Publications

P.O. Box 960, Herndon, VA 20172-0960, USA,

or Fax to 703-661-1501.

Order by phone: 703-661-1580 or 800-645-7247.

Order online: www.worldbank.org/publications

Questions? E-mail us at books@worldbank.org

DESU



World Bank Publications

Visit our website at www.worldbank.org/publications